

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang berjalan di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara secara umum belum memadai atau belum sesuai dengan teori-teori yang ada.
2. Proses pengendalian internal dalam menjaga keamanan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan masih adanya anggota merangkap tugas.
3. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya laporan arus kas) masih menggunakan sistem manual.
4. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal masih diambil dari sesama anggota KPRI INSKO, bukan diambil dari pihak luar yang independen, sehingga peluang terjadinya intervensi pada sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas masih terbuka lebar.
5. Tidak adanya pemeriksaan secara mendadak terhadap fungsi kas, sehingga pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas tidak berjalan efektif.
6. Kurangnya fasilitas yang memadai pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan sistem penerimaan dan pengeluaran kas sangat penting dalam menjaga arus kas dalam suatu instansi. Maka sebaiknya instansi menerapkan sistem yang memadai dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas serta terus

melakukan pembenahan atau pembaharuan sistem yang lebih efektif dan efisien untuk mengikuti perkembangan zaman.

2. Instansi perlu melakukan evaluasi efektivitas pengendalian internal atas sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keakuratan atas proses penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Sistem pencatatan transaksi dan pencatatan laporan keuangan (khususnya zlaporan arus kas) lebih baik menggunakan sistem komputerisasi agar lebih efisien dan efektif.
4. Badan pengawas yang menjalankan fungsi pengendalian internal harusnya diambil dari pihak luar yang independen, sehingga dapat meminimalisirkan peluang terjadinya intervensi pada sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Menambah fasilitas pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemeriksaan harusnya dilakukan secara berkala terhadap fungsi kas, sehingga pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dapat berjalan efektif.
7. Sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebaiknya melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab secara merata dan lebih memperhatikan dokumen yang ditiadakan pada KPRI INSKO agar *internal control* dapat berjalan dengan baik.